

UJI KEPATUHAN PADA FALSAFAH BANGSA DI ERA GLOBAL

Sukarno Hs

I. PENDAHULUAN

Kepatuhan suatu bangsa pada falsafah yang menjadi pilihannya merupakan faktor penentu sejarah perkembangan baik bangsa yang bersangkutan maupun komunalitas bangsa-bangsa di dunia. Keberhasilan bangsa dalam menapaki kehidupan untuk meraih cita-cita melalui bernegara terbukti sangat bervariasi. Sejarah mencatat bahwa bangsa-bangsa di dunia belahan barat yang lebih pragmatis-positivistis dinilai lebih maju daripada bangsa-bangsa di dunia belahan timur yang idealis-religius.

Kendati kenyataan bahwa Jepang dan Korea Selatan menjadi negara progresif, namun bukan sebagai akibat dikotomi belahan dunia barat dan timur melainkan kedua negara tersebut telah menerapkan prinsip pragmatisme-positivistis. Pada era global ini negara-negara pragmatisme-positivistis nampak lebih mendominasi atau menjadi pelopor terdepan dalam bidang ekonomi dan teknologi. Kendati demikian pada negara pragmatis-positivistis yang masih berpegang teguh pada religie lah yang nampak tidak kehilangan jati diri bangsanya. Sementara negara pragmatis-positivistis sekular mengalami kesulitan untuk menemukan identitas bangsanya. Telaah berikut mencoba membandingkan kepatuhan bangsa pada falsafah bangsanya antara Malaysia dengan Indonesia secara acak. Kedua negara tersebut sebagai negara berkembang, negara idealis-religius yang mencoba memadukan konsep pragmatis-positivistik melalui modernisasi (pembangunan). Kedua negara memiliki ciri budaya yang hampir sama, namun memiliki sejarah kemerdekaan yang berbeda. Kondisi geografis serupa, mayoritas pemeluk agama yang hampir sama, namun jumlah penduduk yang jauh berbeda, menjadikan varian yang menarik dalam perbandingan tersebut.

II. FALSAFAH BANGSA INDONESIA DAN MALAYSIA

A. FALSAFAH PANCASILA

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik mencanangkan Pancasila sebagai dasar falsafah. Pancasila diakui sebagai nilai-nilai yang digali dari bumi Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sejak bangsa Indonesia ada. Sifat-sifat yang dimiliki adalah : politis, kultural, religius, etnis, yuridis, sosialis, humanis universal, mengayomi dan melindungi, universal dan eternal, ideologis, demokratis, comprehensive-harmonis, psikologis, edukatif, dinamis-progresif (Soesanto Darmosoegondo, 1977). Secara normatif Pancasila telah menjadi hukum dasar negara. Secara formal Pancasila telah menjadi dasar semua naskah produk yuridis di negara Indonesia. Secara kurikuler Pancasila telah menjadi mata pelajaran/ kuliah wajib. Sehingga secara faktual bangsa Indonesia telah berhasil menanamkan pengetahuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya ideologi kepada generasi penerus semenjak dibangku sekolah bahkan pra sekolah.

Secara politis Pancasila telah menjadi dasar ideologi semua organisasi politik dan organisasi massa. Secara historis nilai-nilai Pancasila telah menjadi kiblat/acuan untuk mengukur penyimpangan perilaku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila juga dijadikan simbol promosi pejabat negara dalam mempertahankan kekuasaannya. Secara teoritis; filosofis, Pancasila dinyatakan sebagai ideologi dalam berbagai dimensi : kehidupan bersama (Soerjanto Poespowardojo, 1991), kehidupan ketatanegaraan (Padmo Wahjono, 1991). kehidupan hukum bangsa Indonesia (A Hamid S Attamimi; 1991), kehidupan budaya (M Sastrapatedjo, 1991), kehidupan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Abdurrahman Wahid, 1991), kehidupan Sosial (Selo Sumardjan, 1991), kehidupan politik (Alfian, 1991), kehidupan ekonomi (Mubiyarto, 1991), kehidupan dengan dunia internasional (Moechtar Kusumaatmadja, 1991) dan kehidupan pertahanan keamanan (Saafudin Bahar; 1-991). Pancasila sepadan dengan paham Integralistik (Moerdiono, 1991) sangat potensial dalam memfasilitasi keberlangsungan bangsa Indonesia yang memiliki majemuk keyakinan, ras, suku, adat budaya dalam mencapai cita-cita bersama melalui bernegara. Pancasila berpotensi

membekali bangsa Indonesia dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa dunia di era global karena Pancasila adalah ideologi terbuka (Moerdiono, 1991). Bahkan dalam satu kurun waktu pemerintahan orde baru (selama 32 tahun), telah diprogramkan secara nasional dan sistematis tentang "Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila juga diniatkan sebagai ideologi negara yang humanis integral, yang mampu memberikan corak manusiawi pada kesejahteraan umum yang ingin dicapai sekaligus memberikan corak manusiawi pada cara-cara pencapaiannya. Dalam menghadapi masalah dan tantangan internal dan eksternal di era global, Pancasila dijadikan resep yang mampu mendasari pengembangan sikap bangsa Indonesia yang dewasa dan bertanggungjawab secara etis, mampu mengarahkan masyarakat yang cerdas dan mandiri, mampu menciptakan iklim kehidupan yang seimbang; kekeluargaan, pola hidup kerakyatan dan mampu mendorong dinamika perjuangan.

B. FALSAFAH RUKUN NEGARA MALAYSIA

Malaysia sebagai negara federasi kerajaan telah mencanangkan Falsafah Rukun Negara yaitu Kepercayaan Kepada Tuhan; Kesetiaan Kepada Raja dan Negara, Keluhuran Perlembagaan, Kedaulatan Undang-Undang dan Kesopanan dan Kesusilaan. Sejak awal merdeka falsafah tersebut telah dijadikan senjata dalam menanggulangi masalah besar yaitu melawan Partai Komunis China Malayan. Falsafah itu pula yang menjadi modal memecahkan problema besar yaitu rasial hingga kini. Falsafah Rukun Negara menjadi sumber spirit dalam menegakkan kedaulatan negara, menegakkan hukum, menegakkan-moralitas bangsa dan negara. Malaysia mewajibkan falsafah rukun negara menjadi falsafah pendidikan yang dijabarkan ke dalam kurikulum dan norma-norma penyelenggaraan sekolah. Program peningkatan kualitas pendidikan dengan penerapan the New Primary School Curriculum (NPSC) tahun 1983 dan the Integrated Scondary School Curriculum (ISSC) tahun 1989 meniatkan basil keseimbangan pengetahuan yang relefan dengan

kecakapan/ketrampilan didasari nilai-nilai etika dan moral yang kuat pada setiap peserta didik (Government of Malaysia, 1991a, p.158 dalam M Adil Khan, 1996, p.99).

Visi 2020 Malaysia meniatkan penerapan prinsip demokrasi yang sesuai dengan falsafah negaranya yaitu 'Asian Democracy not Western Democracy Models'. A proponent of strong leadership and paternalism..... that successful development requires political stability, long-range vision and consistency (Mohamad and Ishihara, 1995, p.82-4 dalam M Adil Khan, 1996, p.114-5). Prinsip demokrasi terkontrol, harmonisasi, sosial, pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan, sangat kental bagi pemerintahan Malaysia. Falsafah Rukun Negara Malaysia sebagai dasar melaksanakan 'Dasar Ekonomi Baru' dalam mewujudkan 'Wawasan 2020' yaitu Malaysia yang maju dalam perpaduan negara dan kesepaduan sosial, ekonomi, keadilan sosial; kesetabilan politik, sistem pemerintahan, mutu kehidupan; nilai-nilai sosial dan kerokhanian (Malaysian for Peace, www.peaCemaysia.COM, 2004)

III. APLIKASI FALSAFAH BANGSA

Tingkat universalitas Pancasila sebenarnya lebih tinggi, namun justru memiliki daya aplikasi yang kurang jika dibanding dengan Falsafah Rukun Negara Malaysia. Pancasila terumuskan dalam lingkup budaya "Jawa" yang kental dengan mytos serta lulusan koloni bangsa Belanda, sedangkan Falsafah Rukun Negara terumuskan dalam kultur "rasionalitas melayu" yang agamisirelegius lulusan koloni bangsa Inggris. Terdapat paradok negatif dalam penerapan Pancasila yaitu :

- a. Prinsip toleransi-dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa teraplikasi menjadi 'pembiaran' umat jauh dari kewajiban religi.
- b. Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menjadi perisai yang kurang menguntungkan bagi pelaksanaan HAM (Hak Azasi Manusia) di Indonesia (mengatasnamakan kemanusiaan untuk melindungi kejahatan).
- c. Prinsip Persatuan Indonesia menjadi. rancu dengan upaya penanganan dan disintegrasi bangsa yang mengabaikan 'perbedaan budaya'

- d. Prinsip demokrasi menjelma menjadi mekanisme permusyawaratan melalui perwakilan formal yang tidak dilandasi hikmah kebijaksanaan, tetapi justru sebagai 'ajang' perjuangan pamrih.
- e. Pencapaian keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ternyata ditempuh dengan menghalalkan segala cara dan mengerucut atau hanya berpihak kepada yang golongan yang dekat dengan sumbu kekuasaan dan beruntung secara ekonomis.

Aplikasi Pancasila mensyaratkan kesadaran individu yang sangat tinggi/kuat, sementara itu tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan kehidupan kebangsaan/kolektif tidak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada individual. Paradoksial logika yang mustahil tersebut, membuka peluang lebar tidak teraplikasikannya Pancasila dengan baik. Pancasila juga merupakan kaidah dalam lokus moral yang tersekat dengan lokus yuridis, sehingga tidak tersentuh sanksi positif bagi pelanggarnya. Problema mendasar ini menjadi penyebab semakin kecilnya kepatuhan warga negara, rakyat dan bangsa Indonesia pada falsafah bangsanya. Hanya pada mereka yang memiliki moralitas/religiusitas tinggi yang dapat diharapkan memiliki derajat kepatuhan yang tinggi. Populasi mereka kecil, itupun umumnya telah puma pengembalian amanat kekuasaan formal.

Rumusan Falsafah Rukun Negara Malaysia lebih menyentuh ke wilayah yuridis sehingga lebih terukur aplikasinya terutama rukun kesetiaan kepada raja dan negara. Indikator kesetiaan kepada raja dan negara lebih mudah mengidentifikasikannya dari pada- persatuan- Indonesia misalnya: -Rukun- ini - dapat dijadikan sentral pelaksanaan rukun yang lain, lebih-lebih didukung oleh rukun kedaulatan undang-undang yang jelas penjabarannya. Pengkhianat bangsa mudah diketahui terjerat perundang-undangan sekaligus sebagai penyimpang terhadap falsafah bangsa di Malaysia daripada di Indonesia. Falsafah bangsa Indonesia memang lebih demokratis dan lentur daripada falsafah negara Malaysia.

IV. KEPATUHAN PADA FALSAFAH BANGSA

Era global mengharuskan setiap bangsa bersikap melalui sistem kenegaraannya. Negara yang mampu mengendalikan pengaruh akan lebih eksis

daripada negara yang mudah 'tergoda' karena mempunyai posisi 'ketergantungan'. Sebagai negara ke tiga (bukan Liberalis dan bukan pula komunis/sosialis) Indonesia dan Malaysia ternyata termasuk negara yang sama-sama konsisten dalam memegang teguh falsafah bangsanya paling tidak pada tataran 'konstitusional'. Lebih jauh konsistensi tersebut pada tataran pembakuan secara kurikuler di setiap jenjang pendidikan misalnya

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah ini memperkemlaangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kecemerlangan dan tahap kualitas yang berterusan dalam semua aspek pendidikan ke arah melahirkan generasi pelajar yang mempunyai pribadi dan akhlak mulia, berilmu pengetahuan, berkemahiran dan berbudaya saing yang merangkumi Kecemerlangan Sahsia; Kecemerlangan Akademik dan Kecemerlangan Kurikulum yang menepati Falsafah Pendidikan dan Wawasan 2020, serta menghasilkan pelajar bestari"
(<http://www.sabah.edu.my/lsk.kayau.ppr/fpn.htm>).

Hal tersebut senada dengan arah kebijakan pendidikan nasional Indonesia "...untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya..."(Garis Besar Haluan Negara RI, 1999). Konsistensi kepatuhan pada falsafah bangsa di bidang pendidikan ini sebagai indikator kepatuhan regeneratif. Fakta menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan di Indonesia awalnya lebih pesat jika dibanding di Malaysia; namun berbanding terbalik pada abad ke 21 ini, adalah suatu indikasi daya juang kepatuhan pada falsafah bangsa yang konkrit.

DAFTAR BACAAN

1. Darmodihardjo, Darji dkk. *Santiaji Pancasila. Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
2. Darmosoegondo. *Falsafah Pancasila*. Bandung : Alumni, 1983.
3. Khan, M Adil. *Economic Development. Poverty Alleviation and Governance. The Asian experience*. England: Avebury, 1996.
4. Oetojo Oesman dan Alfian. *Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta:Deppen RI, 1991.
5. Poespowardojo, Soerjanto. *Filsafat Pancasila. Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*. Jakarta: Gramedia, 1989.
6. Falsafah Pendidikan Negara [http://lwcuw.sabah.edu.my/sk.ka rau.ppr/fpn.htm](http://lwcuw.sabah.edu.my/sk.ka%20rau.ppr/fpn.htm)
7. Development of Private Education. Jabatan Pendidikan Swasta .<http://LVww.studymalaysia.com/jpsl>
8. Pengenalan Wawasan 2020. Malaysians for Peace. www.peacemalaysia.com